

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2011, Mesir masih bergejolak dengan krisis kepemimpinan yang pada akhirnya memaksa mantan Presiden Husni Mubarak lengser dari jabatannya. Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun dan dia bersikukuh mempertahankan kekuasaannya meski menghadapi demonstrasi besar-besaran. Husni Mubarak menjadi pengganti Sadat, presiden sebelumnya yang tewas dibunuh seorang fanatik pada 1981. Dalam kepemimpinannya, Mubarak tidak mengubah garis politik pendahulunya yang tetap membawa arah politik luar negeri Mesir condong ke Amerika, bukan saja karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal), tapi juga karena desakan situasi, khususnya situasi dunia Arab yang tetap tidak menentu. Hanya saja, berbeda dari Sadat, dalam membuat keputusan politik di awal masa pemerintahannya, Mubarak lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan konsensus.

Dalam menentukan kebijakan luar negeri, di satu sisi dia mengupayakan dunia Arab bersedia menerima kehadiran Mesir kembali, tetapi di lain pihak berharap Amerika dan Israel bisa memahaminya. Tidak lama setelah memegang tampuk pemerintahan, Mubarak melakukan serangkaian langkah diplomatik yang menawarkan harapan cerah. Ia berhasil merukunkan kembali hubungan Mesir dengan Saudi Arabia. Lebih dari itu, pada 7 Agustus

1981 Saudi Arabia malah menawarkan rencana perdamaian yang salah satu pasalnya hampir sama dengan isi perjanjian Camp David, yakni mengakui hak hidup dengan damai semua negara di Timur Tengah. Ini berarti Israel dan Palestina termasuk di dalamnya. Keberhasilan terbesar politik luar negeri Mesir pada masa pemerintahan Mubarak terjadi pada 1984 saat Mesir diterima kembali menjadi anggota OKI, dan memulihkan hubungan diplomatik Mesir dengan Yordania pada September 1984 yang didahului pemulihan hubungan Mesir dengan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina).

Masalah ekonomi dan pengangguran yang meningkat adalah kepentingan nasional Mesir paling mendesak untuk diperjuangkan. Pada waktu Mubarak mengambil alih kekuasaan menyusul pembunuhan Sadat pada Oktober 1981, Mesir membayar dua miliar dolar AS per tahun, kira-kira sama dengan pendapatan minyak plus pendapatan dari Terusan Suez. Faktanya, Mubarak memulai pemerintahannya dengan defisit dua kali lebih besar dari klaim surplus itu. Pada tiga periode pemerintahannya Mubarak sebenarnya membawa perbaikan ekonomi, sementara partai-partai politik diperbolehkan untuk hidup dan berkembang. Namun di masa selanjutnya, ia mulai digerogeti kolusi, korupsi dan nepotisme. Dia juga bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, Mubarak banyak memenjarakan lawan-lawan politiknya. Husni Mubarak dinilai sebagai pemimpin yang kurang baik karena selama masanya memimpin, banyak rakyat yang dikecewakan. Terlebih lagi usahanya menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang dinilai tidak manusiawi

dilakukan oleh rakyat Mesir menunjukkan kekecewaan mereka yang menumpuk atas kepemimpinan husni Mubarak selama ini yang dianggap terlalu otoriter.

Kini di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi, Mesir masuk ke dalam transisi pemerintahan. Mursi yang seorang insinyur, mengalahkan rival terdekatnya Ahmed Shafiq pada pemilu Minggu (24/6/2012) lalu. Mursi menang dengan raihan suara 51,7 persen dan mengukuhkannya sebagai presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis. Sebagai sosok yang tumbuh dari kalangan Ikhwanul Muslimin (IM), Mursi sebelumnya dianggap akan membawa Mesir ke arah yang lebih konservatif. Tetapi dirinya menjanjikan sebuah pemerintahan yang demokratis. Presiden Mesir Mursi untuk pertama kalinya setelah menjabat presiden mengunjungi AS. Berbeda dengan pendahulunya, Mursi harus memperhitungkan kehendak rakyat dalam kebijakan luar negerinya.

Selama beberapa dekade, diktator Mesir merupakan mitra negosiasi yang menguntungkan bagi Barat. Sebagian besar kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Husni Mubarak bertujuan untuk memakmurkan sekelompok kecil elit pemerintahan. Rakyat Mesir hampir sama sekali tidak mengambil keuntungan, dikatakan Osama Nour El-Din, kepala departemen riset Partai Kebebasan dan Keadilan. "Di bawah Mubarak kita mengikuti AS secara membabi buta. Tapi sekarang berbeda," dikatakan El-Din. Sekarang kebijakan luar negeri Mesir melayani kedua belah pihak. "Kami ingin agar rakyat Mesir melihat hasil dari kebijakan luar negeri Mesir"

Berbeda dengan Mubarak, tampaknya Presiden Muhammad Mursi tidak dapat begitu saja mengabaikan pandangan rakyat Mesir, terutama jika ia ingin kembali memenangkan Pemilu. Namun walaupun sentimen anti-Amerika merebak di Mesir, akibat situasi ekonomi yang dihadapi, Mursi tetap harus menjaga hubungan dengan Amerika Serikat. Sejak protes muncul, hubungan kedua negara telah menjadi lebih dingin. Baru-baru ini, bahkan Presiden AS Barack Obama tidak menyebut Mesir sebagai sekutu, namun menggolongkan hubungan hanya sebagai “netral”.

Kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Mursi memang jauh berbeda dengan Mubarak. Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Hal tersebut tidak lepas dari faktor luar negeri dan dalam negeri. Faktor dalam negeri antara lain dipengaruhi oleh kondisi domestik termasuk tujuan nasional dan juga presidennya selaku pengambil kebijakan.

Kondisi negara Mesir yang bertolak belakang antara pemerintahan Husni Mubarak dan Muhammad Mursi tersebut memberikan dampak yang cukup besar baik hubungan antara pemerintah Mesir dengan rakyatnya maupun hubungan Mesir dengan negara-negara yang dahulunya menjadi sekutunya. Hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai kondisi Mesir di bawah pemerintahan Muhammad Mursi dimana banyak perbedaan dengan masa pemerintahan Mubarak.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut :

“Bagaimana kebijakan politik luar negeri Mesir di bawah kepemimpinan presiden Mursi?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai adalah untuk menggambarkan kebijakan politik luar negeri Mesir dibawah kepemimpinan Muhammad Mursi dan bagaimana korelasinya dengan latar belakang Presiden Mursi sebagai bagian dari Ikhwanul Muslimin yang berseberangan dengan pemerintahan sebelumnya, yang berdampak pada hubungan antara Mesir dengan Negara seperti Amerika Serikat dan Israel. Hal ini dapat dianalisa dengan menggunakan teori Politik Luar Negeri yang mendasari suatu hubungan antar Negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan teoritis dan mempertegas wawasan berfikir. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan

baik dan menggunakan kerangka dan metode kepenelitian akan menambah

pengetahuan teoritis maupun memperkaya wawasan dan pengalaman bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Data yang dikumpulkan diukur, dibandingkan dan dianalisis, serta akan dapat memberikan dampak bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus terhadap ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi dan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang kebijakan Politik Luar Negeri Mesir dibawah kepemimpinan Muhammad Mursi dalam rentang waktu sejak beliau terpilih menjadi Presiden hingga terjadinya peralihan kekuasaan yang mengakibatkan lengsernya pemerintahan Mursi (2012-2013).

F. Kerangka Teori

Konsep Politik Luar Negeri

Hubungan internasional merupakan hubungan melintasi batas wilayah suatu negara dimana dalam kehidupan internasional, setiap negara melakukan kerjasama, diplomasi dan lain-lain dengan negara lain. Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu

dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.¹

Dalam prakteknya, hubungan internasional dilakukan oleh negara-negara yang berdaulat melalui tindakan-tindakan yang diwakili oleh para elit pemerintahannya yang menyangkut kepentingan-kepentingan suatu negara yang ingin dicapai dan dipertahankan di luar batas wilayah negara. Apabila bertentangan dengan kepentingan atau melanggar kedaulatan negara lain maka akan menimbulkan suatu pertentangan yang mengarah pada konflik. Studi hubungan internasional tidak hanya membahas interaksi positif antar negara-negara tetapi hubungan internasional juga merupakan studi mengenai diplomasi strategik dan konflik.

Ketika Perang Dunia II berakhir, keadaan dunia dikuasai oleh dua kekuatan yang berideologi berbeda, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal. Sebaliknya, blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang berideologi komunis. Negara-negara dunia pun terpecah dalam kebijakan luar negerinya. Ada negara yang melaksanakan kebijakan luar negerinya beraliran liberal dan tidak sedikit pula yang melaksanakan kebijakan komunis. Walaupun demikian, muncul pula negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan yang ada, mereka bersifat netral.

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor luar negeri dan faktor dalam negeri.

Secara teoritis, ada tiga elemen utama yang menentukan politik luar negeri suatu negara: sistem internasional, sistem politik domestik, dan aktor pengambil keputusan politik luar negeri. Ketiga elemen tersebut merupakan input yang menentukan *output* (kebijakan) dan *outcome* (implementasi) politik luar negeri². Beberapa faktor domestik yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri diantaranya: sumber daya alam, sumber daya manusia, pemerintah, media massa, kelompok kepentingan, partai politik, dan ideologi bangsa.

Dalam menganalisis perubahan dari kebijakan, harus ditinjau juga dari aspek birokratiknya. Holsti³ menyatakan bahwa yang paling penting adalah *the decision making variables of personality and perception*. Variabel *decision making* menjadi sumber utama perubahan, termasuk pada perubahan struktur organisasi dan perubahan sifat dari *personality* pemimpin. Dengan adanya

² Held David, "Democracy at the Global Order", Oxford: Oxford University Press, London, 1995, hal. 64.

perubahan struktur pasti terjadi resistensi, misalnya pada prosesnya, administratifnya, dan lain-lain. Hal tersebut berkaitan erat dengan persepsi dan personaliti individunya. Untuk mengatasinya diperlukan individu-individu kunci yang berkualitas, berkompeten, dan cukup pengetahuan untuk menghadapi situasi perubahan tersebut.

Politik luar negeri juga sangat tergantung kepada sosok pemimpin yang memiliki karakteristik atau ideologi tertentu dalam memimpin negaranya. Peran besar pemimpin dengan kondisi psikologis, karakteristik, dan sifat-sifat bawaan pemimpin tidak bisa dielakkan lagi dalam politik luar negeri.⁴ Kecenderungan-kecenderungan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi politik luar negeri yang diambil, dalam hal ini pemimpin akan lebih mendengarkan akademisi atau orang yang ahli dalam bidang politik luar negeri, atau malah akan mengabaikan dampak-dampak domestik dengan memprioritaskan kepentingan ideologisnya. Sehingga banyak hal yang menyebabkan perbedaan politik luar negeri suatu negara pada setiap pemerintahan tertentu. Faktor pemimpin yang tidak memiliki kemampuan dalam politik luar negeri akan lebih memfokuskan persepsi dan kreasinya sendiri dalam menentukan politik luar negeri pada masa pemimpin itu berkuasa.⁵ Maka tidak salah jika ada banyak politik luar negeri yang kadang tidak cocok dengan kebutuhan suatu negara dan kepentingan nasionalnya, karena seorang pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Seperti kebijakan yang dilakukan oleh presiden Mursi di Mesir. Jika pada masa kepemimpinan Husni Mubarak, Mesir berpihak dengan Israel dan gerakan Fatah, lawan politik Hamas di Palestina. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh presiden Mursi yang dengan keputusannya melindungi Palestina dari serangan Israel.⁶ Dalam kepemimpinannya, Mubarak tidak mengubah garis politik pendahulunya yang tetap membawa arah politik luar negeri Mesir condong ke Amerika, dengan alasan karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal). Sedangkan Mursi, sosok yang tumbuh dari kalangan Ikhwanul Muslimin (IM), dianggap akan membawa Mesir ke arah yang lebih konservatif. Tetapi dirinya menjanjikan sebuah pemerintahan yang demokratis. Hamas pun memberikan dukungan kepada Mursi, di bawah Mursi, Hamas mengharapkan perhatian terhadap Palestina akan lebih besar.

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Interaksi antar negara itu dapat berlangsung dalam sistem internasional, di mana ternyata negara tetap masih merupakan aktor utama dalam hubungan internasional tadi. Maka dengan demikian hubungan internasional merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional. Dalam interaksi itu pula setiap negara berupaya menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya

⁶ Maharani, Ardini, *dalam* <http://www.merdeka.com/dunia/kebijakan-mursi-diyakini->

dalam forum interaksi masyarakat internasional yakni dengan melalui kebijaksanaan politik luar negeri masing-masing.

Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan rasional (*rational action*) yang dilakukan suatu negara dengan sengaja untuk mencapai kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional. Pembuatan kebijakan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi, dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran-penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada.⁷

Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politik luar negeri ini merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri merupakan mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan.

Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain di

⁷ Mar'ud Mochtar, 1994, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi

dunia. Politik luar negeri adalah sebuah posisi pembeda. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu politik luar negeri cenderung bersifat tetap.

Dalam membahas politik luar negeri, pengertian dasar yang harus diketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.⁸

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.⁹

Dalam pelaksanaan tentang politik luar negeri terdapat tiga determinan yang harus di perhatikan. Pertama adalah kepentingan nasional, dimana politik luar negeri adalah pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara

⁸ DR. Anak Agung Banyu Perwira & DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakary, Bandung 2005 hal 35.

⁹ Perwira dan Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya

terhadap lingkungan luarnya. Politik luar negeri sebagai pencerminan dari kepentingan nasional dikemukakan oleh J. Frankel :

Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.¹⁰

Hal yang perlu diperhatikan dalam keterkaitan kepentingan nasional dan politik luar negeri adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri tersebut semaksimal mungkin dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional, baik diukur dari kepentingan keselamatan dan keamanan nasional, maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan nasional.

Determinan kedua yang berhubungan dengan politik luar negeri adalah kemampuan nasional. Kemampuan nasional adalah kemampuan yang dimiliki suatu bangsa, baik secara aktual maupun bersifat potensial. Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.

Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan.¹¹

Politik luar negeri sebagai rangkaian atau sekumpulan komitmen, mengacu kepada strategi, kepentingan dan tujuan-tujuan khusus (*specific goals*) serta sarana-sarana (*means*) untuk pencapaiannya. Komitmen dan rencana

¹⁰ J. Frankel, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990, hal 55.

¹¹ K. J. H. de Vries, *Politik Internasional dan Kemampuan Nasional Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987, hal 10.

tindakan ini dapat ditelaah dari kondisi riil dan situasi nyata yang sedang berlangsung, sehingga dapat lebih mudah diamati dan dianalisa.

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negeri, tetapi tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia.

Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai yang terdapat dalam sistemnya.¹²

Sufri Yusuf memberikan sebuah definisi standar menyatakan bahwa politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.¹³ Karena situasi dan kondisi dunia yang tidak statis, tetapi mengalami dinamika yang terus berkembang, maka kebijaksanaan politik suatu negara selalu mengalami penyusunan atau peyesuaian dengan kondisi politik luar negeri, karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Oleh sebab itu kebijaksanaan politik luar negeri sangat ditentukan oleh kondisi obyektif politik dalam negeri. Apa yang dirumuskan pada politik dalam negeri, akan menjadi acuan untuk perumusan politik luar negeri yang di tujukan pada dunia internasional.

¹² *Ibid*, Hal. 133

¹³ Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis Teoritis dan Ujian Pelaksanaan* Prateka Sinar, Jakarta, 1980, hal.110

G. Hipotesis

Peralihan kekuasaan dari Husni Mubarak ke Muhammad Mursi membawa dampak yang cukup signifikan pada bergesernya pola kebijakan politik luar negeri Mesir. Hal ini dapat dilihat serta dibuktikan pada pola hubungan antar negara Mesir dengan Amerika Serikat maupun Israel.

H. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan bentuk pertanyaan yang digunakan maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana dalam skripsi ini hanya ada satu variabel yang akan diteliti, sementara teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dimana hampir semua bahan yang digunakan berasal dari buku, jurnal dan sumber lainnya berasal dari koran, *website*, dan sumber laporan lainnya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang berisi mengenai latar belakang permasalahan serta pokok permasalahan yang akan dibahas, selain itu juga merumuskan beberapa hal pokok antara lain, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini

BAB II. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MESIR DI BAWAH KEPEMIMPINAN MUBAROK

Bab ini memaparkan mengenai apa saja kebijakan Politik Luar Negeri Mesir pada era Mubarak yang difokuskan pada hubungan Mesir dengan Amerika Serikat dengan Israel.

BAB III. RUNTUHNYA REZIM HUSNI MUBAROK

Bab ini menjelaskan mengenai masa transisi dari lengsernya Husni Mubarak hingga terpilihnya Mursi, pembahasan tentang IM (sejarah singkatnya dan difokuskan pada pandangan atau keterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam kancah politik Mesir serta pandangan IM terhadap kebijakan politik luar negeri Mesir di bawah Mubarak, terutama hubungan Mesir dengan Amerika Serikat dan Israel), serta profil Mursi (membahas profil Mursi dan keterlibatannya dalam kancah politik Mesir).

BAB IV. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI NEGARA MESIR DI BAWAH KEPEMIMPINAN MURSI

Pada bab ini memaparkan kebijakan politik luar negeri Mesir pada era Mursi yang difokuskan pada hubungan Mesir dengan Amerika Serikat dan Israel.

BAB V. KESIMPULAN

Bagian ini menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh yang dijadikan

keputusan yang menjadi solusi permasalahan

BAB II

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MESIR DI BAWAH KEPEMIMPINAN MUBARAK

A. Biografi Husni Mubarak

Nama lengkap Husni Mubarak adalah Muhammad Husni Said Muhammad. Dia lahir di Kafr-El Meselha, Al Monufiyah, 4 Mei 1928. Dia merupakan anak seorang pegawai biasa di Kementrian Kehakiman Mesir. Sewaktu kecil dia bercita-cita menjadi seorang da'I yang merupakan keinginan ibunya, sedangkan ayahnya menginginkannya menjadi seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari ayahnya di Kementrian Kehakiman Mesir.¹⁴

Ibunya sangat menginginkan Mubarak untuk menjadi pejuang Islam, sedangkan ayahnya ingin dia menjadi seorang pembela Mesir. Akhirnya Mubarak berkata kepada kepada ibunya bahwa menjadi seorang da'I tidaklah harus selalu berkuat pada agama, tapi juga bisa dengan cara menduduki kursi pemerintahan.¹⁵

Husni Mubarak memiliki seorang istri bernama Suzanne Thabet. Dia merupakan gadis blasteran Mesir Inggris. Suzanne merupakan seorang wanita berpendidikan tinggi, dia merupakan alumnus *American University in Cairo*.

Pernikahannya dengan Suzanne dikarunia dua orang putra. Putra pertama bernama Alaa dan putra keduanya bernama Gamal. Alaa Mubarak tidak mengikuti jejak ayahnya untuk terjun ke dunia politik. Ia lebih memilih berkarir di dunia perbankan.

¹⁴ D. ...
¹⁵ D. ...

Husni Mubarak menjalani sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Shabin El-Koum. Semasa kecil dia selalu menuruti kata ibunya bahwa dia harus menghafal Al-Qur'an dan membaca buku-buku Islam untuk memperdalam wawasannya tentang Islam. setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, Mubarak melanjutkan pendidikan militernya di kairo saat berusia 21 tahun dengan pangkat Letnan Dua.¹⁶

Pada tahun 1950 Mubarak melanjutkan pendidikan militernya ke pendidikan Angkatan Udara dan mendapatkan gelar sarjana di bidang ilmu penerbangan. Ketika lulus, dia berhasil menjadi salah satu dari 10 lulusan terbaik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di angkatan udara, Mubarak dikirim ke Uni Soviet untuk memperdalam ilmunya di bidang Angkatan Udara di *Frunze General Staff Academy*.

Setelah bergabung dengan akademi militer FROUNZE di uni Soviet, dia diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Barat Kairo pada tahun 1964. Kemudian Mubarak juga dipercaya untuk menjadi Direktur Akademi Angkatan Udara pada tahun 1968. Tahun selanjutnya, 1969, Mubarak diamanahkan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Pada tahun 1972-1975 Mubarak dipercaya untuk menjadi Deputy menteri Perang pada masa pemerintahan Anwar Sadat.

Saat terjadinya Perang Arab-Israel pada tahun 1973, Mubarak dipercaya untuk menjadi Komandan angkatan Udara dan dinilai sangat sukses

segalanya dalam perang tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 1974 Mubarak dipromosikan untuk menjadi Letnan Jenderal. Setelah beberapa prestasi gemilang tersebut dia raih, Mubarak pun dipercaya untuk menjadi orang nomor dua di Mesir, yaitu sebagai Wakil Presiden Mesir pada tahun 1975 mendampingi Presiden Mesir, Anwar Sadat. Setelah itu Mubarak diangkat menjadi Partai Demokratik Nasional pada tahun 1979.¹⁷

Pada tanggal 6 Oktober 1981, pemerintah Mesir mengadakan acara Peringatan Hari Kemenangan yang diselenggarakan di depan Tugu “Jundul Majhul”, Nasr City, Kairo. Hari Kemenangan yang dimaksud adalah hari kemenangan ketika Anwar Sadat dan pasukannya berhasil melewati Terusan Suez untuk melawan Israel pada tahun 1973. Saat itu tiba-tiba terjadi peristiwa besar, yaitu Anwar Sadat ditembak oleh orang tak dikenal dan akhirnya Sadat meninggal. Setelah kejadian tersebut, Majelis Al-Sya’ab dan Majelis Al-Syuura mengadakan sidang darurat untuk mengukuhkan Husni Mubarak yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Mesir untuk naik tahta menjadi Presiden Mesir menggantikan Anwar Sadat.¹⁸

Adapun penghargaan yang dia dapat selama menjabat sebagai Presiden Mesir adalah *Man of Peace* tahun 1982, *Personality of The Year* tahun 1984, *Man of The Year* tahun 1985, Medali *Astrolabe* tahun 1989, hadiah dari *Democratic Human Rights* tahun 1990, *Membership and Decoration “Honoris Causa”* tahun 1991, dan *UN Prize of Population* tahun 1994.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 32

¹⁸ *Ibid.*

B. Kebijakan-kebijakan Husni Mubarak

1. Kebijakan-kebijakan Politik Husni Mubarak

Kebijakan politik yang diterapkan oleh Husni Mubarak mampu mempertahankan kekuasaannya selama 30 tahun. Selain itu juga didukung dengan kekuatan militer yang kuat.

Husni Mubarak diangkat menjadi presiden bukan melalui pemilihan umum, namun menggantikan posisi Anwar Sadat yang dibunuh. Mubarak langsung melakukan perpanjangan Undang-Undang Darurat No. 162 tahun 1958 yang disahkan setelah Perang Enam Hari, yaitu pada 1967. Adapun poin dari Undang-Undang tersebut adalah kekuasaan polisi diperpanjang, hak konstitusional ditangguhkan, sensor disahkan, dan pemerintah dapat memenjarakan individu tanpa batas waktu dan tanpa alasan.¹⁹ Dalam bidang politik, Mubarak lebih melakukan modernisasi sesuai budaya Barat. Hal ini pula yang memicu munculnya beragam kelompok Islami dan semakin kuatnya kelompok Islam yang sudah ada.²⁰ Masalah politik dalam negeri yang membuat Mubarak repot adalah permasalahannya dengan para kelompok Islam, baik radikal maupun moderat. Ketika Mubarak diangkat menjadi presiden, dia berjanji untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan masalah sosial, berusaha untuk menindak korupsi, dan membebaskan ketua agama dan politik yang dipenjara saat pemerintahan Sadat.

¹⁹ Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur tengah*. Jakarta: PT. Buku Seru, 2011, hal. 105-106

²⁰ Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Terj. P. Soemitro. Jakarta: yayasan Obor Indonesia. 2000, terj. *Democracy and Civil Society in The Third World Politics & New Political Movement*, 1997, hal. 268

Pada awal masa pemerintahan Mubarak, dia juga tidak banyak mengubah kebijakan Anwar Sadat dengan tujuan membuat sistem demokrasi yang sempurna dan rezim militer tetap mendapat dukungan dari rakyat Mesir dan juga internasional. Husni Mubarak mencoba untuk lebih terbuka. Dia memperbaiki Dewan Rakyat Lokal²¹ yang kini langsung bertanggung jawab kepada eksekutif. Kemudian dia juga mulai melibatkan wanita dalam pemerintahannya. Dia juga memiliki konsep untuk lebih mengendurkan batasan-batasan politik Mesir, termasuk terhadap oposisinya, namun pada kenyataannya gerakan politik dari oposisi Mesir tidak juga mengendur.²²

Hingga 2011, Husni Mubarak menjabat sebagai presiden dengan jangka waktu paling lama dalam sejarah Mesir. Dia memenangkan pemilu yang telah beberapa kali diselenggarakan, yaitu pada 1987, 1993, 1999, dan 2005. Hal ini dikarenakan Mesir memiliki aturan bahwa tidak ada batasan kepada presiden untuk terus menduduki jabatannya. Hal tersebut menjadi salah satu cara yang digunakan Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya. Legitimasi Husni Mubarak terhadap Mesir cukup berbeda dengan presiden sebelumnya. Dia mengatakan bahwa saat itu Mesir sedang dalam proses untuk menuju demokrasi yang sempurna karena Mubarak memang menginginkan demokrasi yang sesungguhnya, sempurna dan proporsional. Pengenalan akan demokrasi tersebut tidaklah mudah. Nilai-

²¹ Dewan Rakyat Lokal adalah sebuah sistem yang membantu Gamal Abdul Naseer dalam bidang birokrasi maupun rakyat pendukungnya. Sumber: Dam Syamsumar & Agus R.

nilai demokrasi tersebut bukanlah berasal dari warga Mesir, namun berasal dari negara-negara Barat sehingga tentulah membutuhkan waktu yang sangat lama agar warga Mesir mampu menyerap nilai-nilai tersebut dengan sempurna.²³ Sejauh demokrasi itu berjalan, rakyat Mesir dapat dikatakan cepat mengadaptasi nilai-nilai tersebut.

Semasa menjabat sebagai presiden, Mubarak juga menjabat sebagai ketua umum NDP (*National Democratic Party*). NDP sendiri mendapat dukungan yang sangat dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sipil, hingga militer. Oleh sebab itu, NDP mampu menjadi partai penguasa yang terus bertahan dari awal hingga Mubarak lengser. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Undang-Undang Pemilu 1984 yang mampu membuat NDP menjadi partai penguasa yang sangat kuat. Secara konseptual, partai selain NDP yang ingin mengikuti pemilihan umum dan mendapat kursi di parlemen minimal harus mendapat dukungan sebesar 8 % dari jumlah suara nasional. Ditambah lagi tidak diberlakukannya sistem koalisi partai politik oposisi dalam pemilihan umum untuk memenuhi persyaratan tersebut.²⁴

Sebagai implementasi dari proses demokrasi yang telah diungkapkan oleh Mubarak, dia tidak melarang legalitas Wafd Party (WP) sebagai oposisi. Dia bahkan mengizinkan berdirinya tiga partai baru yang mulai memasuki dunia perpolitikan Mesir pada 1990, yaitu Green Party (GP), Democratic United Party (DUP), dan Young Egypt Party (YEP). Sebelum

itu, pada 1984 Mubarak juga mengizinkan berdirinya New Wafd party (NWP) dan Moslem Brotherhood (MB). Pada 1997, tercatat 17 partai politik di Mesir yang berdiri sesuai Undang-Undang Kepartaian No. 40 Thun 1977.

Sejak 1987, Mubarak juga mengizinkan independen untuk mengikuti pemilihan umum.²⁵ Ikhwanul Muslim juga diberikan kesempatan oleh Mubarak untuk terjun dalam kancah perpolitikan Mesir. Ikhwanul Muslimin diizinkan mengikuti berbagai pemilihan termasuk pemilihan anggota parlemen di bawah panji-panji partai politik yang diakui secara resmi oleh pemerintah.²⁶ Hal-hal tersebut dimaksudkan agar rakyat Mesir dan dunia luar melihat bahwa Mubarak melakukan pemilihan umum yang bebas, terciptanya keragaman dalam politik Mesir serta adanya partai politik oposisi sebagai bentuk dari demokrasi. Kenyataan di lapangan adalah ketika dilangsungkannya pemilihan umum terdapat banyak kecurangan yang dilakukan NDP melakukan intervensi birokrasi yang dilakukan dalam lingkup nasional. Hasilnya tentulah NDP selalu memenangkan pemilu dengan jumlah pemilih hampir dua per tiga dari suara nasional. Mubarak selaku pemimpin partai tersebut juga cukup berhati-hati dalam memilih orang-orang yang menjadi anggota partai yang kelak akan menjadi Dewan Nasional.²⁷

Berbeda dengan NDP sebagai partai berkuasa, partai-partai oposisi mendapat pembatasan-pembatasan dari pemerintah berupa dibatasinya

²⁵ *Ibid.*, hal. 94

²⁶ Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspreso Politik Mesir.*, terj. Rofik Suhud, Bandung: Penerbit Mizan, 1998, terj. dari *Muslim Politics*, 1996, hal. 129

²⁷ Dan Suemasman & Agus P. Rahman, *Op cit* hal. 92-93

“kontak” dengan suatu kelompok masyarakat atau kepentingan sebuah kelompok di Mesir. Para pemimpin partai oposisi sebenarnya tidak menginginkan aturan tersebut. Mereka ingin mengkritisi pemerintahan Mesir yang sangat mengikat kebebasan di Mesir, termasuk dunia politiknya. Pada akhirnya mereka lebih memilih untuk diam daripada harus mengkritik pemerintah dan berakhir dengan diberangusnya partai politik mereka. NWP (New Wafd Party) segera mengatur strategi untuk menjadi partai oposisi terkuat di Mesir setelah pemilu 1984. Mereka membentuk menteri-menteri bayangan serta mekanisme-mekanisme lainnya untuk memperkuat peranannya sebagai partai oposisi Mesir yang nantinya dapat berujung sebagai partai alternatif di Mesir selain NDP.²⁸

Sebagai negara yang sedang menjalani proses menuju demokrasi yang sempurna, Mubarak telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak lima kali, yaitu pada 1987, 1993, 1999, 2005, dan yang terakhir pemilihan anggota parlemen pada akhir 2010. Pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada 1993 terjadi konflik antara NDP dan partai oposisi. Penyelenggara pemilihan umum tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum, bukan dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kemudian pemerintah membuat dokumen kedua yang melibatkan ratusan hakim, pelaksana dari Kementrian Hukum, dan Kementrian Dalam Negeri. Partai oposisi tidak puas atas hal yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Mereka juga tidak menjamin dapat melaksanakan pemilu dengan jujur. Akibatnya, hasil pemilu

tersebut diboikot oleh partai oposisi, namun tetap saja hasilnya adalah NDP sebagai partai pemenang pemilu dan Husni Mubarak kembali menjadi seorang presiden.²⁹

Dalam setiap pemilu yang dilakukan, dapat diprediksi bahwa kemenangan sudah pasti milik NDP. Seperti pemilihan presiden pada 2005 dan pemilihan anggota parlemen pada September 2010 lalu. Dalam pemilihan umum tersebut dapat diprediksi bahwa kemenangan sudah pasti milik NDP. Seperti pemilihan presiden pada 2005 dan pemilihan anggota parlemen pada September 2010 lalu. Dalam pemilihan umum tersebut dapat diprediksi bahwa mustahil calon presiden lainnya akan mengalahkan Mubarak. hal ini disebabkan banyaknya kecurangan yang dilakukan Mubarak, salah satunya mengintimidasi pendukung kontestan oposisi agar memilih Mubarak sebagai presiden.³⁰ Setelah didesak oleh George W. Bush selaku presiden Amerika Serikat, Mubarak akhirnya menyelenggarakan pemilihan umum terbuka pada tahun 2005. Dalam pemilu tersebut, Ikhwanul Muslimin diberikan kesempatan untuk mengikuti pemilu tersebut. Ketika mereka memenangkan 20% kursi di parlemen, Mubarak kembali membubarkan Ikhwanul Muslimin.³¹

Mubarak tidak menginginkan pemerintahannya digoyahkan oleh siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya. Segala cara dia lakukan agar dia tetap mempertahankan pemerintahannya. Mubarak tidak akan

²⁹ *Ibid.*, hal. 94

³⁰ "Senjakala Mubarak". *Tempo* 13 Februari, 2011. Hal. 21

³¹ "Finito Goyah Mubarak". *Tempo* 13 Februari, 2011. Hal. 21

segan-segan menggunakan hukum untuk menindas lawan-lawan politiknya melalui aparatnya. Imbalannya, aparat penegak hukum 'direstui' untuk korupsi. Akibatnya tidak hanya kepada lawan politiknya, namun juga terhadap rakyat yang lemah akan semakin lemah dan yang kuat akan semakin kuat.³² Mubarak juga menerapkan kebijakan yang *despotic*, yaitu adanya Undang-Undang *security act* yang berisi bahwa pemerintah dengan bebas dapat menangkap siapa saja tanpa proses hukum.³³ Penjabaran-penjabaran tersebut dapat menggambarkan bahwa kondisi politik di Mesir cukup represif. Siapa saja yang menentang kebijakan Mubarak akan dihukum.³⁴

Secara *de jure*, sistem pemerintahan Mesir adalah republik sejak 1952, namun secara *de facto* Mesir tidak dapat dikatakan negara republik karena negara dengan sistem republik adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Sedangkan pemerintahan Mubarak akan menindas siapa saja yang diduga menguncang rezim kekuasaannya. Hal ini ditandai dengan terbatasnya ruang gerak wartawan dalam menulis berita yang tentunya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Selama Mubarak menjabat sebagai Presiden, dia tidak pernah sekalipun mengangkat Wakil Presiden. Amerika Serikat pernah memberi saran kepada Mubarak untuk mengangkat dua orang Wakil Presiden, satu berasal dari sipil dan satunya berasal dari Militer, namun Mubarak tidak

³² Fuad Bawazier, "Revolusi Mesir: Pergantian Sistem". Republika 14 Februari 2011,

³³ Sammy Abdullah, "Elbarandei Pun Pulang", Republika 1 Februari 2011, hal. 2

³⁴ Yusuf Dantiyani, "Kedaulatan Rakyat di Era Sistem Modern". Republika 4 Februari

menggubrisnya. Dalam tradisi politik Mesir, jabatan Wakil Presiden adalah jalan menuju Presiden.³⁵ Hal ini dapat dibuktikan ketika Anwar Sadat menjadi Wakil Presiden Gamal Abdul Nasser, dia naik menjadi seorang Presiden ketika Gamal Abdul Naseer wafat. Begitu pula Husni Mubarak, dia diangkat menjadi Presiden karena sebelumnya dia adalah Wakil Presiden.

Setelah sekian lama Mubarak menjadi presiden, semakin lama semakin pula dia sibuk untuk menikmati dan menjaga kekeuasannya hingga lupa untuk menyejahterakan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Banyak rakyat Mesir yang berpendidikan rendah, intel ada dimana-mana dan saip menangkap siapa saja yang tidak disukai oleh Mubarak, misalnya terdapat 1.200 orang anggota Ikhwanul Muslimin yang sedang meringkuk di penjara. Secara politik, Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah kekuatan oposisi yang cukup kuat dan sangat efektif. Bahkan, seorang penulis di Mesir yang mengamati dan memahami masalah ini mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi kelompok alternatif Islamis yang berpengaruh tetapi anti kekerasan.³⁶ Hebatnya, meskipun pemerintah Mesir menekan Ikhwanul Muslimin, kelompok ini tetap mendapatkan eksistensinya.³⁷

Dalam pemerintahannya, Mubarak menjalankan tiga fungsinya sebagai Presiden, yaitu menyejahterakan rakyat Mesir, menjaga kepentingan

³⁵ "Mesir Tidak Menentu". Kompas 31 Januari 2011, hal. 10

³⁶ "Mubarak Didesak Turun". Kompas 27 Januari 2011, hal. 10

³⁷ Fawaz A. Gerges, *Amerika dan Islam Politik*, terj. Kili Pringgodigdo dan Hamid Danuhib, Jakarta: Alfabeta, 2002, terjemah dari *America and Political Islam: Clash of Civilization or*

Israel, dan Amerika Serikat di Timur Tengah, sesuai Perjanjian *Camp David*.³⁸ Mubarak mampu menjaga kestabilan Mesir. Dia melakukannya dengan menjalin hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat yang merupakan negara dan berkawan baik pula dengan Israel.³⁹ Beberapa kali dia melakukan perundingan dengan AS, antara lain pembahasan bantuan ekonomi militer AS kepada Mesir dengan George W. Bush di Gedung Putih Washington DC pada 4 April 1989, kemudian pembahasan perundingan damai di Timur Tengah dengan Bill Clinton di Kairo pada 2000, terakhir dengan Barack Obama untuk membahas perundingan damai antara Palestina dengan Israel yang bertempat di Gedung Putih Washington DC pada 1 September 2001.⁴⁰

Sejak 1938, Ikhwanul Muslimin mulai memasuki ranah politik. Diawali dengan diterbitkannya Mingguan Al-Nadzir yang terkadang mengeluarkan ancaman akan ‘melawa politisi atau organisasi yang tidak mendukung Islam dan pemulihan kejayaan’.⁴¹ Di bawah kepemimpinan Al-Tilimsani, Ikhwanul Muslimin menerima pluralisme politik dan demokrasi parlementer. Ikhwanul Muslimin tidak bisa menjadi partai politik karena Undang-Undang Mesir. Oleh karena itu, mereka lebih memilih beraliansi dengan Partai wafd saat pemilu 1984. Parta Wafd mendapat 65 kursi dari 459 dan memberikan 7 kursi untuk Ikhwanul Muslimin. Akhirnya

³⁸ Agun N. Cahyo, *Tokoh Timur tengah yang Diam-Diam Jadi Antek Amerika Serikat dan Sekutunya*, Jogjakarta: DIVA Press, 2011, hal. 159

³⁹ *Ibid.*, hal. 160

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 162-163

⁴¹ Esposito, John L (ed), *Ensiklopedi Oxford "Dunia Modern Islam"*. Jilid 2, ditranskripsikan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y.N. dkk

persekutuan tersebut menjadi oposisi paling kuat menyaingi NDP. Menjelang 1987, koalisi tersebut berakhir dan Ikhwanul Muslimin memilih berkoalisi dengan Partai Buruh Sosialis dan Partai Liberal dalam Pemilu 1987.⁴²

Militer di Mesir berbeda dengan militer yang ada di negara-negara lain. Dapat dilihat dari keempat Presiden Mesir yang berasal dari kalangan militer. Pada masa pemerintahan Husni Mubarak, militer di Mesir tidak hanya untuk menjaga keamanan negara, tetapi juga memasuki berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh adalah militer diizinkan untuk mengelola berbagai macam industri di Mesir.

Angkatan bersenjata Mesir lahir pada zaman utsmani. Pada 1801-1830, mereka tidak aktif dalam menjalankan tugasnya karena adanya pengaruh Eropa dalam pembangunan Mesir, sehingga tentara milik negara tidak terlalu dilibatkan. Para perwira Mesir kemudian memulai untuk membentuk rasa nasionalisme. Para perwira yang sangat peduli dengan nasib bangsanya kemudian sering mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masa depan Mesir. Semakin lama mereka tidak hanya melibatkan semua perwira angkatan tersebut saja, namun juga melibatkan senior dan junior mereka. Akhirnya, pada 1939 terbentuklah organisasi Perwira Bebas yang beranggotakan perwira angkatan bersenjata Mesir sekaligus menjadi organisasi rahasia pertama di Mesir. Adapun tokoh-tokoh

Rauf, Abdil Lathif Al-Baghdadi, Hassan Ibrahim, Khaled Mukhieddin, Ahmed Saudi Hussein, Hassan Izzat. Organisasi inilah yang kemudian memicu Revolusi 1952 yang pada akhirnya menumbangkan rezim Raja Farouk.⁴³

Militer di Mesir memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dengan negara lain. Militer di Mesir telah memasuki kawasan ekonomi dan politik. Pada 1981 dibuatlah UU Darurat Militer yang memberikan kekuasaan kepada militer untuk mengendalikan Mesir. Militer di Mesir menguasai serta mengelola aneka industri, mulai dari pariwisata, tekstil, otomotif, sampai produk perawatan rambut. Militer setempat mengelola industri mobil Hyundai, menghasilkan berbagai barang, mulai dari air minum kemasan, sup kalengan, minyak, hasil pertanian, sampai memproduksi gas alam. Otomatis hampir seluruh personil militer Mesir tersebar di segala penjuru industri di Mesir. Contoh lainnya adalah setelah peristiwa Luxor⁴⁴ 1997 yang menewaskan ratusan wisatawan asing dan warga sipil, Mubarak memecat Menteri Dalam Negeri, Al-Afwi, kemudian diambil alih oleh militer. Hal tersebut adalah kejadian pertama kali ketika tentara menjaga situs-situs bersejarah dan turisme yang sebelumnya dilakukan oleh polisi.⁴⁵ Kuatnya posisi militer ini ditandai dengan adanya kenyataan bahwa semua Presiden Mesir berasal dari militer, yaitu Muhammad Naguin, Gamal Abdul Naseer, dan Husni Mubarak.

⁴³ Dam Syamsumar & Agus R. Rahman, *Op.cit.* hal. 74-76

⁴⁴ Peristiwa Luxor adalah pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Al Jama'ah Wa

Keadaan Mesir pada zaman Mubarak merupakan keadaan yang sangat nyaman untuk para tentara militernya. Bagaimana tidak, perdamaian telah terwujud, tidak ada lagi permusuhan dengan Israel. Mereka tidak lagi 'memegang' senjata. Tentara kalangan atas tentulah hidupnya menjadi sangat sejahtera, mereka disebut juga dengan kalangan 'militer berdasi'. Berbekal kekuasaan dan kekuatan politik, usaha yang dijalankan oleh militer tentulah sangat berkembang pesat. Para 'tentara berdasi' pun tidak perlu membayar pajak ataupun lisensi usaha mereka. Sedangkan nasib yang berbeda dialami oleh tentara kelas bawah yang tidak menjalani kemewahan seperti tentara berpangkat tinggi.⁴⁶

Militer Mesir memiliki 468.500 personel aktif dan 479.000 personel cadangan. Angkatan Darat terdiri dari 340.000 personel dan memiliki 3.050 tank tempur, 5.182 kendaraan lapis baja, dan 4.413 artileri. Untuk Angkatan Laut, terdiri dari 18.500 personil dan memiliki 4 kapal selam, 1 kapal *destroyer*, 10 kapal frigat, 12 kendaraan amfibi, serta 41 helikopter unit patrol. Sedangkan untuk Angkatan Udara, terdiri dari 30.000 personil dan memiliki 400 pesawat tempur, lebih dari 53 pesawat angkut, 328 pesawat latih, dan 258 helikopter. Mesir juga memiliki 80.000 personel untuk pertahanan udara dengan lebih dari 72 sistem pertahanan, lebih dari 702 rudal darat ke udara dan lebih dari 1.566 meriam antipesawat.⁴⁷

Militer Mesir mengeluarkan dana sebesar US \$ 4.143 miliar pada 1985 dan US \$ 3.583 miliar pada tahun 1991 untuk bidang pertahanan.

⁴⁶ Abdullah Sammy, "Negosiasi Mesir Gagap". *Republika* 8 Februari 2011, hal. 8

⁴⁷ Abdullah Sammy dan H. Muhammad, "Militer Mesir Tempur Tempur". *Republika* 12

Sedangkan jumlah tentara pada 1985 sebanyak 445.000 dan 410.000 pada 1991. Mubarak juga mengimpor senjata konvensional sebanyak US \$ 10.957 miliar pada 1987-1991.⁴⁸

2. Kebijakan Dalam Bidang Agama

Mesir identik dengan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Al-azhar sebagai pusat perkembangan agama Islam di dunia. Selain itu Mesir juga merupakan tempat lahirnya Ikhwanul Muslimin yang pengaruhnya terus menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Saat Mubarak menjadi Presiden, dia melakukan berbagai kebijakan dan tindakan dalam bidang agama dalam mempertahankan kekuasaannya.

Islam merupakan agama negara yang resmi dan disahkan oleh negara. Mayoritas penduduk Mesir menganut agama Islam. Konstitusi Mesir memberlakukan syari'at Islam sebagai dasar konstitusi negara. Kemudian agama yang juga diakui Mesir adalah Kristen, khususnya Kristen Koptik. Kristen Koptik merupakan agama tertua sekaligus agama asli orang-orang Mesir. Penganutnya sekitar 10%. Di Mesir juga bermunculan berbagai aliran-aliran agama, salah satunya adalah Aliran Baha'i. Aliran ini mengakui nabi-nabi agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Mereka berpendapat bahwa Muhammad bukanlah nabi terakhir. Aliran ini dianut ribuan orang di Mesir. Selain itu, di Mesir juga terdapat kalangan Qo'ranihin. Kalangan ini hanya berjumlah puluhan orang, mereka hanya percaya Al-Qur'an tetapi tidak mempercayai Hadist Rasul.

⁴⁸ Esposito, John L (ed), *Ensiklopedi Oxford "Dunia Modern Islam"*. Jilid 1, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y.N. dkk

Pada awal masa pemerintahannya, Mubarak mulai mengencarkan demokratisasi yang sudah dimulai sejak Anwar Sadat. Mubarak memberikan perlakuan yang baik kepada kehidupan Islam. dia mengizinkan Islam untuk menduduki kursi parlemen, mendapatkan peran penting dalam lembaga professional, serta usaha-usaha bidang penerbitan.

Mubarak juga menepati janjinya untuk membebaskan para pemuka agama yang dipenjara pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Mubarak membebaskan 'Abdul Hamid yang telah dipenjara sejak awal September 1981, sebelum Sadat dibunuh, hingga 25 Januari 1982.⁴⁹ Pada masa Gamal Abdul Naseer dia dipenjara beberapa lama karena tidak mau memberikan fatwa tentang hukuman mati. Meskipun Mubarak lebih terbuka dan mengizinkan Islam bergerak bebas, kelompok Islam radikal masih terus ada dan membayang-bayangi serta mengancam pemerintahannya. Kelompok Islam radikal memang mengancam rezim pemerintahan presiden sejak rezim Gamal Abdul Naseer. Salah satu contoh kelompok tersebut adalah Al-Jihad yang senang memberikan kejutan-kejutan dan pembunuhan untuk merongrong pemerintah Mubarak serta menimbulkan kekacauan sosial yang kemudian akan terbukalah peluang agar kelompok Islam militant menguasai Mesir.⁵⁰ Dalam dunia Islam di Mesir, terdapat kelompok-kelompok lain

⁴⁹ Esposito, John L (ed), *Ensiklopedi Oxford "Dunia Modern Islam"*. Jilid 3, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y.N., dkk. Bandung: Penerbit Mizan, 2001, hal. 138

⁵⁰ Esposito, John L (ed), *Ensiklopedi Oxford "Dunia Modern Islam"* Jilid 4, diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* oleh Eva Y.N., dkk.

yang juga memiliki pengaruh penting dalam pemerintahan, yaitu Al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin.

Mubarak ternyata kurang mampu merangkul rakyat menengah ke bawah dan justru mereka dikucilkan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan kelemahan sistem politik, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakterampilan pemerintah dalam mengurus ekonomi, ketergantungannya pada bantuan luar negeri dan sifat menghambanya kepada Amerika Serikat yang berakibat tidak adanya legitimasi.⁵¹ Melihat hal tersebut, akhirnya Mubarak memilih jalan untuk menjauh dari sekularisme dan mengubah berbagai hal menjadi lebih Islami, termasuk bidang politik. Tentu saja dia melakukannya untuk menekan kekerasan dari kelompok Islam radikal sehingga pemerintahannya jauh lebih aman dari sebelumnya. Maksud dari Mesir lebih Islami adalah memberikan kebebasan kepada rakyat Mesir dalam melaksanakan segala perintah Islam. samapai-sampai Mubarak sempat melambatkan liberalisasi ekonomi yang ia canangkan untuk lebih memfokuskan diri mengurus kelompok Islam radikal yang membuatnya kerepotan.⁵² Pendekatan yang ia lakukan tidak begitu berhasil. Kisruh antara pemerintahan Mubarak dengan kelompok Islam radikal tersebut mampu menyedot perhatian kelompok atau organisasi di Mesir maupun organisasi luar negeri. Hal tersebut berdampak pada berbagai aspek, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan agama. Adapun penyebab dari munculnya kelompok Islam radikal adalah akibat dari merosotnya

ekonomi, mundurnya legitimasi dan otoritas Mesir.⁵³ Akhirnya Mubarak tidak tahan dengan kegiatan dan berbagai hal yang dilakukan oleh kelompok Islam. Dia menurunkan pasukan keamanan untuk menumpas kelompok Islam, baik moderat⁵⁴ maupun radikal.⁵⁵

Pada awal 1990, Clinton mengatakan kepada Mubarak bahwa dia harus menangani penyebab munculnya gerakan Islamis, yaitu pemerintahan yang tidak representative, tingkat pengangguran membengkak, korupsi, dan menurunnya kondisi kehidupan rakyat. Mubarak dengan halus menolak saran dari Amerika Serikat tersebut dan tidak mau mengalami hal sama dengan Aljazair yang mampu memenangkan pemilu. Menteri Dalam Negeri Mesir, Jenderal Musa mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kelompok Islam radikal di Mesir untuk memenangkan pemilu.⁵⁶

⁵³ Jeff Heynes, *Op cit*, hal. 263

⁵⁴ Moderat adalah selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Sumber: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 1.035

⁵⁵ Awalnya dia masih menyambut baik akan kehadiran Ikhwanul Muslimin yang dia anggap sebagai kelompok Islamis moderat. Mubarak menuduh Ikhwanul Muslimin telah bersekongkol dengan Al Jama'ah wa iihad untuk melakukan terorisme. Sumber: Fauz A. Gerges